

## DEMONSTRASI PRO-DEMOKRASI DI THAILAND

7

Sita Hidriyah

### Abstrak

*Bangkok menjadi perhatian media belakangan ini, menyusul demonstrasi besar-besaran yang dilakukan warga Thailand pro-demokrasi, yang menuntut reformasi politik. Pemicunya adalah tindakan represif yang kerap dilakukan rezim militer terhadap kelompok masyarakat kritis, sehingga memunculkan tuntutan reformasi sekaligus pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha. Tulisan ini membahas mengenai demonstrasi yang terjadi di Thailand, dan bagaimana seharusnya ASEAN menyikapi. Aksi demonstrasi di Thailand adalah sebuah keniscayaan bagi gerakan pro-demokrasi, terlebih hal itu diinisiasi oleh kaum muda terpelajar yang menganggap rezim yang berkuasa tidak mendukung demokrasi. Aksi demonstrasi di Thailand sesungguhnya menjadi urusan dalam negeri negara tersebut, dan tidak bisa dicampuri pihak luar. Namun situasi akan menjadi lain jika demonstrasi yang berkelanjutan ini tidak menemukan titik temu penyelesaian dan mengarah pada situasi anarkis, sehingga terjadi instabilitas politik di Thailand. Di sinilah peran ASEAN untuk mengingatkan Thailand, termasuk melalui AIPA, dan sejalan dengan tujuan pembentukan Komunitas ASEAN, untuk mendukung penguatan demokrasi di kawasan.*

### Pendahuluan

Situasi politik di Bangkok, ibukota Thailand, dalam beberapa minggu terakhir menjadi perhatian media internasional, menyusul aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh warga Thailand pro-demokrasi, yang menuntut pengunduran diri perdana menteri, perubahan konstitusi, dan reformasi monarki. Di sisi lain, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha menolak mundur dari jabatannya, bahkan sebaliknya,

Ia memberlakukan dekrit darurat, meski kemudian dicabut kembali, yang melarang demonstrasi ataupun kegiatan kerumunan sebagai upaya untuk menekan demonstrasi yang sudah berlangsung sejak Juli 2020 (kompas.com., 17 Oktober 2020).

Demonstrasi pro-demokrasi saat ini memang telah menyita perhatian media di samping menjadi salah satu aksi demonstrasi terbesar dalam sejarah Thailand. Selain karena dilakukan di tengah situasi pandemi Covid-19, sebagian besar para aktor



gerakan pro-demokrasi kali ini merupakan kaum muda. Mereka kecewa dengan pemerintahan militer yang dianggap telah membungkam demokrasi dan tidak memperlihatkan kemajuan dalam pemerintahan. Tulisan ini membahas mengenai demonstrasi yang terjadi sejak Juli 2020. Mengapa demonstrasi pro-demokrasi yang berlangsung di Thailand saat ini begitu kuat, dan bagaimana seharusnya disikapi oleh ASEAN dalam konteks penguatan demokrasi di kawasan. Sebelumnya, dibahas terlebih dahulu secara singkat hal yang melatarbelakangi munculnya gerakan pro-demokrasi yang dipimpin oleh kaum muda Thailand.

## Gerakan Pro-Demokrasi di Thailand

Aksi demonstrasi menuntut mundur Perdana Menteri Thailand sudah terjadi sejak Juli 2020. Pemicunya adalah tindakan represif yang kerap dilakukan rezim militer terhadap kelompok-kelompok masyarakat kritis, sehingga memunculkan tuntutan reformasi monarki sekaligus pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha. Para pengunjuk rasa juga menilai bahwa Prayuth telah merekayasa pemilu tahun lalu untuk mempertahankan kekuasaan yang direbutnya dalam kudeta tahun 2014. Demonstrasi secara garis besar memang bertujuan untuk mengakhiri kekuasaan pemerintah dan membatasi kekuasaan raja. Gerakan pro-demokrasi yang diinisiasi oleh kaum muda ini juga ingin mengakhiri kekerasan yang kerap terjadi selama satu dekade antara pendukung rezim militer (pimpinan Prayuth Chan-o-cha) dan

penentangannya (republika.co.id., 15 Oktober 2020)

Sebagaimana diketahui, militer di Thailand selama ini telah lama memposisikan diri sebagai satu-satunya pembela raja, sedangkan Raja Maha Vajiralongkorn menghabiskan sebagian besar waktunya di Jerman, tetapi kekuatannya membenteng di setiap aspek kehidupan masyarakat Thailand. Situasi ini tampaknya mengusik sebagian masyarakat Thailand yang pro-demokrasi, terutama kaum muda, karena dianggap tidak bijak dan tidak sejalan dengan tuntutan demokrasi yang ingin mereka kembangkan, sehingga memunculkan gerakan reformasi monarki yang sebelumnya tabu.

Kekuasaan raja di Thailand memang cukup besar jika didasarkan pada hukum *lese-majeste*, yang melarang penghinaan terhadap monarki, sehingga menjadi salah satu hukum yang paling ketat di dunia. Mereka yang dinyatakan bersalah karena melanggar peraturan ini akan menghadapi hukuman 15 tahun penjara. Sementara ketentuan hukum tersebut digunakan oleh rezim yang berkuasa untuk menekan kebebasan berpendapat. Sejak Raja Bhumibol Adulyadej wafat di tahun 2016, gerakan reformasi monarki mulai muncul di masyarakat, terutama dari kaum muda, yang meminta adanya pembatasan pada kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn. Aktivis pro-demokrasi meminta monarki beradaptasi dengan zaman modern dan menuntut penghapusan undang-undang pencemaran nama baik kerajaan, yang melindungi raja dari kritik, dan meminta raja tidak terlibat dalam politik.

Gerakan pro-demokrasi terus bergulir, dan satu hal yang mencolok dari demonstrasi kali ini, adalah semakin banyaknya anak muda (mahasiswa dan pelajar) yang ikut berdemonstrasi (bbc.com., 17 Oktober 2020). Hal ini terjadi karena bagi banyak anak muda dan pemilih pemula, demonstrasi kali ini dipandang sebagai peluang untuk terjadinya perubahan setelah bertahun-tahun pemerintahan Thailand dipegang militer dan kerap mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan politiknya. Akibatnya, terpilihnya kembali Prayuth Chan-o-cha sebagai Perdana Menteri Thailand, sedangkan Prayuth adalah pemimpin militer yang memimpin kudeta.

Pandemi tampaknya tidak menjadi penghalang bagi siapa saja untuk melakukan demonstrasi guna menuntut perbaikan. Demonstrasi yang dilakukan di beberapa negara dunia untuk mengkritisi pemerintahan yang dianggap otoriter dan tidak demokratis pada pandemi saat ini, sepertinya turut memberi dorongan bagi sebagian masyarakat Thailand untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara. Demonstrasi, sebagai salah satu cara demokrasi untuk menurunkan Perdana Menteri Prayuth dan mengurangi kekuasaan raja, dinilai sebagai upaya rakyat, yang diwakili kaum muda, untuk melakukan perubahan di Thailand agar menjadi lebih baik dan demokratis, baik terkait sistem pemerintahan maupun kekuasaan monarkinya.

### **Sikap ASEAN**

Di tengah situasi pandemi Covid-19, berbagai aksi demonstrasi terjadi di beberapa negara Asia

Tenggara. Negara-negara Asia Tenggara memang memiliki sistem politik yang berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini pada akhirnya memunculkan beragam tipe demokrasi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia, Filipina, dan Malaysia sepertinya menjadi contoh negara paling demokratis di Asia Tenggara. Namun, contoh tersebut bisa saja tidak bernilai jika pemerintah atau rezim yang berkuasa mengabaikan aspirasi masyarakat dan tidak merespons kritik konstruktif yang muncul dari rakyatnya.

Hal ini menjadi tantangan bagi ASEAN dalam membangun dan mengembangkan demokrasi. Tidak saja di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand, bahkan di hampir semua negara ASEAN. Demokrasi belum sepenuhnya terimplementasi dan menjadi komitmen untuk dijalankan bagi sejumlah negara ASEAN. Hal tersebut bisa saja dilatarbelakangi oleh adanya persepsi yang berbeda di antara negara ASEAN tentang demokrasi. Tidak mengherankan jika kemudian, keragaman sistem pemerintahan negara-negara anggota ASEAN telah memunculkan kebebasan dalam berekspresi serta berpendapat sesuai dengan aturan dan sistem pemerintahan yang berlaku di masing-masing negara.

Terlepas dari dinamika demokrasi yang berkembang di kawasan, demokrasi merupakan salah satu fokus pembangunan terpenting bagi komunitas ASEAN sebagaimana disebutkan dalam Piagam ASEAN. Komunitas ASEAN adalah sebuah komunitas yang bertujuan memperkuat demokrasi dan melindungi Hak

Asasi Manusia (HAM). Komitmen ASEAN ini, sudah tentu, menjadi tantangan sekaligus pekerjaan rumah yang tidak ringan, karena belum semua negara ASEAN mengimplementasikan secara sungguh-sungguh sistem politik yang demokratis, salah satunya Thailand.

Kembali ke persoalan demokrasi di Thailand, terlihat bahwa gerakan pro-demokrasi kali ini seakan tidak bisa dibendung, bahkan semakin masif, tidak saja di dalam negeri Thailand, tetapi juga di luar negeri, khususnya di Jerman di mana Raja Thailand lebih banyak tinggal di sana. Kedutaan Besar Thailand di Jerman pun kemudian tidak luput dari sasaran demonstrasi pro-demokrasi (detik.com., 26 Oktober 2020). Tidak dapat dipungkiri, bahwa gaya hidup mewah Raja Maha Vajiralongkorn dengan sejumlah isteri selirnya, turut memicu kekecewaan masyarakat Thailand, terutama dari kalangan pelajar, yang menghendaki adanya perubahan, termasuk sistem monarkinya.

Aksi demonstrasi pro-demokrasi yang terus terjadi di Thailand, sudah tentu, memiliki implikasi tidak saja terhadap jalannya pemerintahan, tetapi juga terhadap iklim ekonomi di Thailand. Di bidang investasi, misalnya, instabilitas politik yang tengah terjadi di Thailand telah menjadi faktor penghambat bagi masuknya modal dari luar. Pasalnya, kondisi internal, seperti stabilitas politik, merupakan pertimbangan para pemilik modal untuk menanamkan uangnya ke suatu negara. Jika melihat lima tahun ke belakang, Thailand sebenarnya dapat dikatakan memiliki performa yang

baik dalam mendatangkan investor asing ke negaranya. Hal ini dapat terlihat dari total penanaman modal asing (FDI) Thailand yang tumbuh 14% per tahunnya, lebih tinggi dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya (cnbcindonesia.com., 22 September 2020).

Memperhatikan aksi demonstrasi pro-demokrasi di Thailand yang terus bergulir, dan belum terlihat tanda-tanda akan berhenti, setidaknya hingga akhir Oktober 2020, ASEAN, sebagai organisasi regional yang menghimpun negara-negara Asia Tenggara, terlepas dari prinsip non-intervensi, bisa saja mengingatkan negara anggotanya tersebut untuk memelihara situasi kondusif dan lebih mengedepankan dialog dalam merespons aksi demonstrasi. Cara-cara represif harus dihindarkan karena tidak sejalan dengan tujuan pembentukan Komunitas ASEAN, yang antara lain menjunjung tinggi demokrasi dan penghormatan HAM. Dalam kerangka memantapkan Komunitas ASEAN, ASEAN harus berani introspeksi dengan mengajak seluruh anggotanya untuk mengembangkan dan memperkuat kehidupan demokrasi yang sehat.

Dorongan bagi berkembangnya kehidupan demokrasi yang sehat di lingkup ASEAN, sudah seharusnya juga didukung oleh ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA). Melalui jejaring AIPA, anggota parlemen negara-negara ASEAN bisa saling berbagi pengalaman dalam menghadapi situasi seperti yang dihadapi Thailand saat ini. Kepedulian sesama negara anggota ASEAN, termasuk parlemennya, terhadap situasi di Thailand harus didasari oleh kepentingan untuk

memelihara stabilitas di kawasan. Bukan tidak mungkin, aksi demonstrasi yang terus berlangsung di Thailand dan tidak kunjung berhenti, tidak saja akan merugikan Thailand, tetapi juga kawasan. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan negara-negara di kawasan lainnya, akan mengalami kesulitan jika ingin membangun kerja sama dengan Thailand yang tengah menghadapi instabilitas politik.

### Penutup

Aksi demonstrasi di Thailand yang menuntut pengunduran diri perdana menteri, pembatasan kekuasaan raja, dan amandemen konstitusi, adalah sebuah keniscayaan bagi gerakan pro-demokrasi, terlebih hal itu diinisiasi oleh kaum muda yang menganggap rezim yang berkuasa tidak mendukung kehidupan demokrasi. Bagi kaum muda terpelajar di Thailand, terutama dari kalangan mahasiswa, kehadiran rezim represif dianggap tidak sejalan dengan kehidupan demokrasi, dan oleh karenanya perlu diturunkan, termasuk melalui cara demonstrasi. Tidak cukup di situ, kehadiran raja dengan kekuasaannya yang cukup kuat juga perlu dievaluasi dan dibatasi, karena dianggap sudah tidak sejalan dengan tuntutan demokrasi dan tatanan kehidupan masyarakat modern.

Demonstrasi pro-demokrasi yang masif terjadi di Thailand sesungguhnya menjadi urusan dalam negeri negara tersebut, dan tidak bisa dicampuri oleh pihak luar. Berikan kepercayaan kepada Thailand untuk mengatasinya secara konstitusional yang sejalan dengan prinsip demokrasi, yaitu

melalui proses partisipasi publik yang inklusif, transparan, dan tanpa rekayasa politik. Situasi akan menjadi lain jika demonstrasi pro-demokrasi yang berkelanjutan ini tidak menemukan titik temu penyelesaian dan mengarah pada situasi anarkis, sehingga terjadi instabilitas politik di Thailand. Jika instabilitas politik berkepanjangan, maka implikasinya tidak saja ke dalam negeri Thailand, tetapi bisa juga ke kawasan. Di sinilah peran ASEAN untuk mengingatkan Thailand, termasuk melalui AIPA, dan sejalan dengan tujuan pembentukan Komunitas ASEAN, untuk mendukung upaya penguatan demokrasi di kawasan.

### Referensi

- "Demonstrasi di Thailand, Polisi Diberi Kewenangan Menyensor Media", 19 Oktober 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/19/193000565/demonstrasi-di-thailand-polisi-diberi-kewenangan-menyensor-media?>, diakses 20 Oktober 2020.
- "Demonstrasi Thailand: Mengapa Kaum Muda Memimpin Aksi Besar-Besaran dan Bersedia Melawan Hukum?", 17 Oktober 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54566339>, diakses 19 Oktober 2020.
- "Ini Penyebab Warga Thailand Demo Berbulan-Bulan", 15 Oktober 2020, <https://republika.co.id/berita/qi8mcn459/ini-penyebab-warga-thailand-demo-berbulanbulan>, diakses 19 Oktober 2020.
- "Keadaan Darurat Diberlakukan", *Kompas*, 16 Oktober 2020, hal. 4.

“Petisi Demonstran ke Jerman Persoalkan Kekuasaan Raja Thailand”, 26 Oktober 2020, <https://news.detik.com/internasional/d-5229933/petisi-demonstran-ke-jerman-persoalkan-kekuasaan-raja-thailand>, diakses 27 Oktober 2020.

“PM Thailand Tolak Undur Usai Oposisi Abaikan Larangan Demonstrasi, 16 Oktoberr 2020, <https://www.dw.com/id/pm-thailand-prayuth-tolak-mundur/a-55296610>, diakses 20 Oktober 2020.

“Polisi Thailand Selidiki Media”, *Media Indonesia*, 21 Oktober 2020, hal.14.

“Thailand Membara “Dibakar” Demo, Masihkah Pimadona Investor?”, 22 September 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200922061322-4-188386/thailand-membara-dibakar-demo-masihkah-primadona-investor/3>, diakses 20 Oktober 2020.



Sita Hidriyah  
[sita.hidriyah@dpr.go.id](mailto:sita.hidriyah@dpr.go.id)

Sita Hidriyah, S.Pd.,M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Atmajaya Jakarta pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional dari FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Upaya Pemerintah dan Kerjasama Luar Negeri Dalam Pengentasan Kemiskinan Menuju Pembangunan Berkelanjutan" (2013), "Pengungsi Suriah dan Respons Internasional dan Asian Parliamentary Assembly (APA)" (2016), dan "Tantangan Kerjasama Indonesia dan Jepang Dalam Diplomasi Ekonomi " (2016).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.